



**KAJIAN IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MELALUI PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI (RLH)
DI KECAMATAN BENAI**

Risa Harianti

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota,
Fakultas Teknik,
Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah proses penerapan atau implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Benai dengan salah satu programnya yaitu program bantuan rumah layak huni berdasarkan keluaran kebijakan, kepatuhan kelompok sasaran, dampak nyata kebijakan dan persepsi terhadap dampak. Didalam penelitian ini penulis menggunakan data primer data sekunder sebagai acuan untuk mengambil sumber data. Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian penulis menginterpretasikan terhadap hasil yang relevan untuk diambil kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program rumah layak huni di kecamatan Benai sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan bupati kabupaten kuantan singingi no.5 tahun 2017. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program.

Kata Kunci : Implementasi, Program Rumah, Layak Huni.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari suatu negara demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Proses peningkatan kualitas hidup difokuskan kepada peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menciptakan gagasan-gagasan konstruktif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam membentuk dan menciptakan sumber daya manusia yang produktif, maka pembangunan sangat penting untuk dilakukan. Dimana pembangunan beresensi adanya perubahan yang diharapkan terjadi dalam dimensi kehidupan di masyarakat. Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat pada dasarnya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup. Namun tidak semuanya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Mardimin:1996).

Kemiskinan di Indonesia bukan hal yang baru kita lihat dan kita dengar, angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara tetangga maupun di Asia (Edi Suharto:2009).

Mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menanggulaginya. Adapun program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yaitu salah satunya melalui program bantuan perumahan terhadap masyarakat miskin. Hak pemenuhan



atas rumah menjadi salah satu komponen penting yang perlu di perhatikan pemerintah karena kondisi rumah yang dimiliki masyarakat miskin dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria fisik rumah yang layak huni. Pemerintah membuat program rumah layak huni yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan (Bambang Dalam H.Tulung:1994).

Penduduk asli kecamatan benai adalah suku melayu sebagaimana halnya suku-suku melayu yang ada di daerah kabupaten kuantan singingi, suku melayu di daerah ini juga memiliki sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama islam, hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus. Penduduk kecamatan benai disamping suku melayu (asli) adalah suku jawa dan suku minang, masyarakat kecamatan benai pada umumnya tinggal di perkampungan sepanjang batang (sungai) Kuantan, pilihan ini dilakukan atas kepentingan sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari. Sungai kuantan selain sarana transportasi juga sebagai tempat berbagai aktivitas lain, seperti mandi, mencuci dan lain sebagainya. Setiap pemukiman akan di jumpai berbagai tanaman disekelilingnya yang dinamakan pelak.

Pembangunan merupakan salah satu yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Tentunya membangun hal yang sangat diinginkan oleh masyarakat. Apalagi membangun sebuah rumah yang aman dan nyaman bagi keluarganya. Namun impian tersebut tidak bisa dilaksanakan karena kondisi yang tidak memungkinkan yang diakibatkan kemiskinan. Kemiskinan memang menjadi hambatan untuk membangun sebuah rumah, dengan adanya program bantuan rumah layak huni mereka sangat terbantu.

Perumahan dan pemukiman mempunyai fungsi sangat strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi mendatang. Namun persoalan perumahan masyarakat di Kecamatan Benai adalah masih terdapat rumah yang tidak layak untuk di huni karena faktor ekonomi yang tidak bisa memenuhinya. Untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga miskin, kelayakan dilihat dari segi fisik, mental dan sosial. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti langsung ke lokasi studi penelitian. Dalam menggunakan teknik observasi ada dua indera yang sangat vital dalam melakukan pengamatan yaitu pendengaran (telinga) dan penglihatan (mata). Dalam melakukan pengamatan, mata lebih dominan dibandingkan dengan telinga (Usman dan Akbar, 2009). Dalam observasi peneliti mendengarkan lalu mencatat hal-hal yang penting dan melihat keadaan dilapangan dengan dokumentasi melalui foto.

2. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer. sedangkan yang di wawancara disebut interviewee. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian. Adapun yang di wawancarai dalam penelitian ini yaitu sebanyak sebelas orang yang merupakan masyarakat dari berbagai desa yang ada di kecamatan benai, yaitu :



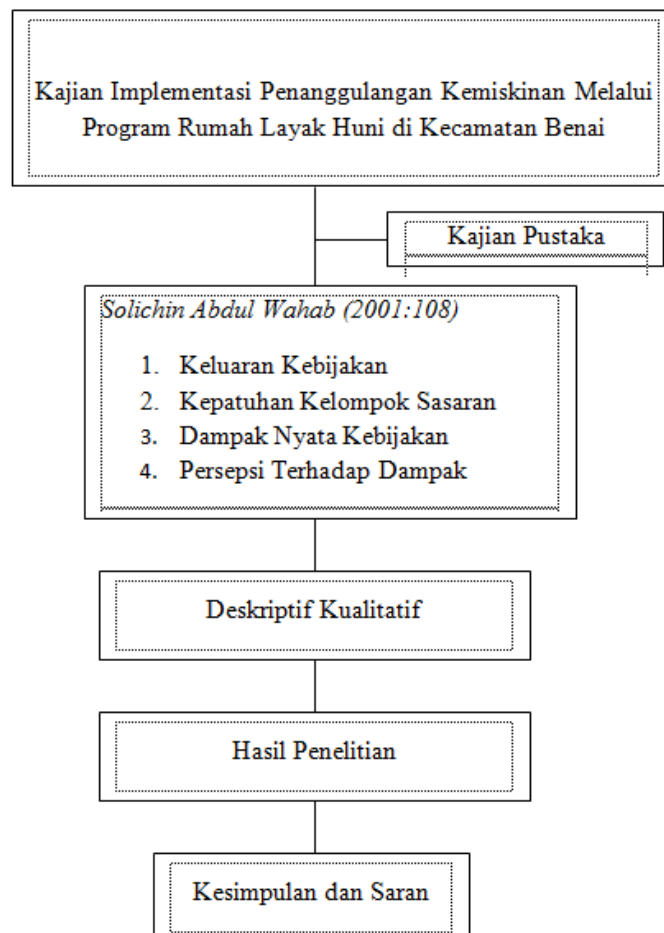
Tabel 1. Wawancara pada Masyarakat

No	Nama Penerima	Nama Desa
1	Sudirman	Pulau Ingu
2	Sinur	Ujung Tanjung
3	Uwel	Siberakun
4	Darisah	Benai Kecil
5	Dasimah	Tebing Tinggi
6	Iset	Tebing Tinggi
7	Neneng	Simandolak
8	Eles	Simandolak
9	Ati	Banjar Lopak
10	Sumiati	Gunung Kesiangan
11	Sulas	Gunung Kesiangan

Sumber : Analisa Peneliti 2018

2.2 Kerangka Pemikiran

Skematisasi kerangka pemikiran merupakan transformasi narasi yang menerangkan hubungan atau konsep-konsep atau variabel-variabel penelitian menjadi sesuatu yang berbentuk skema, artinya yang ada hanyalah perubahan cara penyajian dari narasi menjadi skema. Untuk itu bagan kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran



3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Benai

Jumlah penduduk Kecamatan Benai dari tahun 2013-2016 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan banyaknya penduduk lahir dibandingkan dengan penduduk mati dan juga banyak penduduk datang dibandingkan penduduk pindah di Kecamatan Benai.

Tabel 1. Perkembangan Penduduk Kecamatan Benai Tahun 2013-2016

Tahun	Jumlah Penduduk	Perkembangan
2013	15.623	-
2014	15.822	1.27%
2015	16.009	1.18%
2016	16.194	1.15%

Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi

Tabel 2. Angka Kemiskinan Penduduk Kecamatan Benai Tahun 2013-2016

Tahun	Jumlah Penduduk	Kemiskinan
2013	3.320	-
2014	3.360	1.20%
2015	3.380	0.59%
2016	3.410	0.88%

Sumber : Wawancara Kasi PMD Kecamatan Benai

3.2 Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kecamatan Benai

1. Keluaran Kebijakan

Implementasi Program Bantuan Rumah layak Huni di Kecamatan Benai yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi, melalui dinas sosial pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Kuantan Singingi diukur berdasarkan prinsip pelayanan publik sebagai mana telah ditetapkan dalam peraturan bupati nomor 5 tahun 2017 tentang dasar pelaksanaan pemberian bantuan.

Data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan Rumah Layak Huni tersebut telah diimplementasikan sejak tahun 2014.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASI PMD yaitu Bapak Paimun Hendro,SP mengatakan bahwa pada tahun anggaran 2014 program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Benai dilaksanakan pada 6 (enam) desa dari 16 desa yang ada, dengan jumlah sebanyak 15 unit rumah. Yang mana desa yang mendapatkan bantuan rumah layak huni tersebut adalah desa tanjung simandolak sebanyak 2 unit, desa simandolak 5 unit, desa pulau tengah 2 unit, desa tebing tinggi 2 unit, desa siberakun 2 unit dan desa pulau kalimanting 2 unit.

Pada tahun 2015-2016 Kecamatan Benai tidak mendapatkan program bantuan rumah layak huni dan pada tahun 2017 kecamatan benai kembali mendapatkan bantuan rumah layak huni dengan jumlah sebanyak 11 unit rumah. Desa yang mmendapatkan rumah layak huni yaitu desa pulau ingu 1 unit, desa ujung tanjung 1 unit siberakun 1 unit, desa benai kecil 1



unit, desa tebing tinggi 2 unit, desa simandolak 2 unit, desa banjar lopak 1 unit dan desa gunung kesiangan 2 unit (wawancara dengan KASI PMD)

Tabel 3. Penerima Program Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 2014

No	Nama Penerima	Nama Desa
1	Sumarni	Tanjung Simandolak
2	Gimpam	Tanjung Simandolak
3	Hasneti	Simandolak
4	Nila	Simandolak
5	Reneng Sulastri	Simandolak
6	Yuliana	Simandolak
7	Suran	Simandolak
8	Rosna	Pulau Tongah
9	Firgo	Pulau Tongah
10	Darwisah	Tebing Tinggi
11	Diman	Tebing Tinggi
12	Junai	Siberakun
13	Ide	Siberakun
14	Sonsual	Pulau Kalimantan
15	Niati	Pulau Kalimantan

Sumber : Wawancara KASI PMD Kecamatan Benai

Tabel 4. Penerima Program Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 2017

No	Nama Penerima	Nama Desa
1	Sudirman	Pulau Ingu
2	Sinur	Ujung Tanjung
3	Uwel	Siberakun
4	Darisah	Benai Kecil
5	Dasimah	Tebing Tinggi
6	Iset	Tebing Tinggi
7	Neneng	Simandolak
8	Eles	Simandolak
9	Ati	Banjar Lopak
10	Sumiati	Gunung Kesiangan
11	Sulas	Gunung Kesiangan

Sumber : Wawancara KASI PMD Kecamatan Benai

Dari hasil pengamatan dilapangan dan dengan melihat laporan penggunaan anggaran untuk implementasi program bantuan rumah layak huni di kecamatan Benai berdasarkan informasi dari pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku instansi pengelola atau pelaksana program, maka hal-hal yang dapat dicatat dari penelitian ini adalah :

- Realisasi fisik rehabilitasi rumah layak huni milik masyarakat miskin yang menjadi sasaran dapat diselesaikan dalam tahun anggaran program.
- Penggunaan anggaran program dapat tercapai serapan 100% yang berarti seluruh dana yang di anggarkan dapat disalurkan untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan dalam implementasi program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Benai.



- c) Implementasi program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Benai dilaksanakan untuk ditujukan bagi warga masyarakat keluarga miskin dengan tempat tinggal rumah tidak layak huni.

Didalam pelaksanaan program rumah layak huni di kecamatan benai tidak ada sengketa yang terjadi karena pada umumnya masyarakat yang mendapat bantuan mempunyai atau memiliki tanah sendiri.

2. Kepatuhan Kelompok Sasaran

KASI PMD Bapak Paimun Hendro, SP mengatakan bahwa mekanisme pengajuan atau pengusulan anggaran kegiatan program bantuan rumah layak huni di kecamatan benai sesuai dengan tahap-tahap yang disebutkan di tinjauan pustaka. Dan menurut bapak Akmal Hidayah selaku sekretaris Desa, mengatakan bahwa mekanisme pengajuan atau pengusulan anggaran kegiatan program bantuan rumah layak huni di kecamatan benai kurang sesuai dengan tahap-tahap yang disebutkan di tinjauan pustaka.

Untuk membenarkan pernyataan di atas, peneliti mewawancarai Bapak Eles, dengan mengatakan :

“iya, kalau hanya seperti itu kami sangat mudah untuk memenuhinya, walaupun kami tidak mempunyai surat tanah” (wawancara September 2018).

Penerima bantuan rumah layak huni terlebih dahulu membentuk kelompok dan Selanjutnya masing-masing kelompok mempunyai kewajiban antara lain:

1. Membentuk pengurus kelompok terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota mengusulkan kepada kepala desa untuk ditetapkan serta membuat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan program rumah layak huni.
2. Membuka rekening kelompok sasaran di Bank.
3. Melakukan penilaian bagian rumah yang akan di perbaiki dibantu oleh pendamping sosial berdasarkan standar acuan kerja dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kuantan Singingi untuk menetapkan prioritas bagian rumah yang akan di perbaiki berdasarkan ketersediaan dana dan sumberdaya lainnya.
4. Membuat rincian jenis bahan bangunan yang diperlukan serta besaran biaya kegiatan diperlukan.
5. Menetapkan toko material atau bahan bangunan yang akan menjadi penjamin penyedia material atau bahan bangunan
6. Menunjuk pelaksana yang ahli dalam bidang bangunan
7. Mengusulkan anggaran dana perbaikan rumah kepada kepala desa untuk diteruskan ke bupati Kuantan Singingi melalui dinas sosial Kabupaten Kuantan Singingi dengan melampirkan surat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan dan rincian besaran anggaran perbaikan rumah.
8. Menerima dana Bantuan Melalui Rekening.
9. Melaksanakan perbaikan rumah yang dilakukan oleh ahli dalam bangunan.
10. Mangka waktu pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah selama 120 hari kalender harus sudah tercatat.

Tentang kesiapan pelaksanaan berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan, yaitu selama 120 hari kalender kerja belum bisa dikatakan siap dengan sampai pengecatan. Untuk mengetahui kesiapan pelaksanaan peneliti mewawancarai penerima bantuan, yaitu bapak Diman mengatakan :



“Yang saya ketahui tidak cukup, karena tergantung cuaca, terkadang ada juga bahan bangunan yang datang terlambat”(wawancara September 2018). “waktu yang disediakan sudah cukup, karena itu waktu yang cukup lama” (wawancara Ibu Iset Oktober 2018).

Setelah terbentuk kelompok-kelompok dengan kewajiban masing-masing, selanjutnya pencarian anggaran pelaksanaan kegiatan program sebagai berikut:

- 1) Untuk memanfaatkan dana bantuan, kelompok sasaran penerima mengajukan kebutuhan untuk pembangunan rumah.
- 2) Kepala desa membuat rekomendasi pencairan dana ke Bank dimana kelompok membuka rekening.
- 3) Dasar rekomendasi dari kepala desa tersebut kelompok dapat mencairkan dana anggaran di Bank.
- 4) Dana yang di cairkan dari Bank digunakan untuk belanja material atau bahan bangunan di manfaatkan dalam pembangunan rumah yang akan di rehap.

3. Dampak Nyata Kebijakan

Pelaksanaan program rumah layak huni dapat berjalan lancar apabila kinerja dari orang-orang yang bertanggung jawab dalam program tersebut melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk itu, maka peneliti mencari informasi terkait kinerja dari pelaksana atau orang-orang yang menjalankan program rumah layak huni di kecamatan benai. Salah satunya adalah Reneng Sulastris selaku masyarakat yang menerima bantuan program rumah layak huni, yang mengatakan :

“Saya kira untuk masalah program dan kinerja dari pelaksana sudah bagus dan sesuai dengan tujuan program. Karena mulai dari pengajuan sampai pemberian bantuan di verifikasi terlebih dahulu”. (wawancara juli 2018).



Gambar 2. Wawancara dengan penerima bantuan

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa orang-orang yang melaksanakan program rumah layak huni sudah berjalan dengan baik. Dimana sebelum dilakukan pengerjaan terlebih dahulu diberitahukan kepada ketua kelompok atau masyarakat yang mendapat bantuan.



Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan program, peneliti melakukan wawancara dengan pendamping pelaksana di desa tanjung simandolak yaitu abang Agus Salim, dengan mengatakan :

“Pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan dan penerimanya sudah tepat sasaran, seperti janda-janda, lansia dan rumah tangga miski lainnya. Bahkan warga yang tidak memiliki tanah atau rumah sendiri mendapat bantuan dengan ketentuan mempunyai kartu kependudukan di desa tersebut”.(wawancara September 2018).



Gambar 3. Sosialisasi Program

Untuk membenaran pernyataan pendamping pelaksana di atas diklarifikasi melalui wawancara dengan Gimpam sebagai penerima bantuan, mengatakan :

“Sudah sesuai, dari tahap awal melakukan peninjauan kemudian diverifikasi lagi” (wawancara September 2018).

Hasil implementasi program dapat dilihat antara lain dari indikator-indikator terlaksananya implementasi program berdasarkan persepsi publik. Dan adanya realisasi fisik hasil kegiatan rehabilitasi rumah layak huni menjadi rumah layak huni di permukiman masyarakat. Disamping itu juga ada indikasi lain dari hasil implementasi program rumah layak huni, yaitu terpeliharanya nilai-nilai potensial sosial, pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta adanya peningkatan pendapat dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisa tentang hipotesis ternyata benar bahwa program bantuan rumah layak huni memang berhasil dalam menanggulangi kemiskinan di kecamatan Benai. Di dalam analisa angka kemiskinan bukan berkurang tetapi bertambah karena disebabkan pertumbuhan penduduk juga meningkat setiap tahunnya, jadi bukan program tersebut yang gagal.

4. Persepsi terhadap dampak

Pelaksanaan kegiatan dari implementasi program rumah layak huni di Kecamatan Benai dapat diukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program tersebut dan dampaknya yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini disamping dari hasil observasi dilapangan terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan dalam implementasi program,



juga hasil analisis indikator-indikator yang mengisyaratkan keberhasilan dilaksanakannya program bantuan rumah layak huni yang dirasakan masyarakat, indikator-indikator yang dimaksud adalah tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran.

Hasil analisis indikator-indikator yang dihimpun berdasarkan persepsi terhadap dampak pelaksanaan implementasi program rumah layak huni di Kecamatan Benai telah menunjukkan bahwa secara umum adanya pandangan baik dari masyarakat dan pelaksanaan program. Pandangan baik tersebut mengindikasikan adanya kepercayaan dan tingkat kepuasan masyarakat yang cukup tinggi. Sehingga persepsi terhadap dampak dapat mengindikasikan bahwa kinerja implementasi program rumah layak huni di Kecamatan Benai dapat terlaksana dengan baik. Untuk mendapatkan kebenaran di atas, peneliti mewawancarai ibu Sumiati, mengatakan :

“iya, saya sangat puas dengan hasil kerja dari pelaksana, karena mereka benar-benar mendampingi dalam pelaksanaan pembangunan rumah saya” (wawancara Oktober 2018).

Bapak Sulas menambahkan pendapat yang diberikan ibu Sumiati, dengan mengatakan :

“saya juga puas dengan apa yang dilakukan pelaksana, mereka sangat membantu” (wawancara Oktober 2018).

Tingginya antusiasme masyarakat dalam program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Benai, karena adanya proses komunikasi program yang berjalan dengan baik. Sehingga komunikasi program kepada masyarakat melalui sosialisasi berjalan seperti yang diharapkan, dan masyarakat memiliki tingkat pengetahuan dan motivasi aktif karena menilai bahwa program sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program bantuan rumah layak huni maka masyarakat merasakan peningkatan kesejahteraan, untuk lebih jelas lagi, Ahmadi Kepala Desa Tebing Tinggi mengatakan :

“Jelas mereka sangat berterima kasih kepada pemerintah, karena rumah mereka yang dulu bocor, reok sekarang sudah lebih baik dan mereka tidak memikirkan itu lagi. Dan mereka bias menggunakan uang untuk keperluan yang lain, seperti untuk biaya anaknya sekolah” (wawancara September 2018).



Gambar 4. Wawancara KASI PMD



Berdasarkan wawancara dengan KASI PMD mengatakan dalam komunikasi program melalui sosialisasi terdapat hambatan internal masyarakat, yaitu karena faktor keterbatasan dan rendahnya kemampuan pemahaman masyarakat, namun komunikasi melalui sosialisasi program mampu memberikan informasi tentang program yang akan dilaksanakan. Masyarakat merasa diberi kemudahan dalam mengurus kebutuhannya, maka tingkat efektivitas sosialisasi program dinilai positif oleh masyarakat. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi program dapat berlangsung secara efektif.

Untuk membenarkan pernyataan KASI PMD tersebut, maka diklarifikasi dengan ibu Nila mengatakan :

“Yang dikatakan Bapak Paimun memang ada benarnya, karena kami juga sulit untuk memahami apa yang disosialisasikan oleh pelaksana namun karena mungkin hal tersebut memang sudah menjadi tugas pelaksana maka mereka menyampaikannya secara berulang-ulang sampai kami memahaminya”. (wawancara September 2018).



Gambar 5. Wawancara dengan penerima bantuan program

Bapak Uwel juga memberikan pendapat terkait hal tersebut, dengan mengatakan :

“sebagian dari kami memang tidak paham apa yang disosialisasikan, karena yang hanya kami tau, kami mendapatkan rumah” (wawancara Oktober 2018).

Manfaat program bantuan rumah layak huni yang dirasakan oleh ibu reneng sulastri selaku penerima program bantuan rumah layak huni :

- 1) Program bantuan rumah layak huni dinilai sangat penting bagi masyarakat karena sangat diperlukan dan dinilai telah mampu membantu meningkatkan kesejahteraan.
- 2) Dengan program bantuan rumah layak huni masyarakat juga merasa bahwa kondisi kemiskinan saat ini dapat diubah.
- 3) Program bantuan rumah layak huni telah sesuai untuk tetap dijalankan dan tidak perlu diganti dengan program lain.
- 4) Pelaksanaan program sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Selain pendapat yang diberikan ibu Reneng Sulastri mengenai manfaat program berikut menurut ibu Ati, mengatakan :



“Kami merasa terbantu dengan adanya Program bantuan Rumah Layakhuni karena orang-orang seperti kami memang layak untuk di bantu”. (wawancara September 2018).



Gambar 6. Wawancara dengan penerima bantuan program

Pertanyaan yang sama di ajukan kepada ibu Dasimah dengan mengatakan :
“program ini sangat membantu kami, karena tanpa ada bantuan yang diberikan pemerintah kami tidak akan bisa membuat rumah sebagus ini” (wawancara September 2018).

Implementasi program bantuan rumah layak huni menurut masyarakat umum :

- 1) Program bantuan rumah layak huni telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Program bantuan rumah layak huni dalam pelaksanaannya mampu menciptakan peluang kerja.
- 3) Program bantuan rumah layak huni dinilai berdampak positif telah menyebabkan beban masyarakat berkurang setelah menerima bantuan.

3.3 Pembahasan

1. Keluaran Kebijakan

Setelah dilakukan observasi dilapangan terhadap realisasi fisik hasil kegiatan program rumah layak huni dan analisi terhadap hasil implementasi program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Benai menunjukkan bahwa implementasi program tersebut telah memberikan dampak jangka waktu pendek. Indikator ukuran dapat dilihat dari realisasi fisik pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial pemukiman masyarakat terhadap rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.

Sebagaimana di uraikan dalam rumusan analisis diatas, realisasi fisik rehabilitasi rumah layak huni warga masyarakat miskin yang menjadi sasaran program dapat diselesaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Benai dapat berhasil dengan tepat waktu.



Realisasi fisik Program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Benai tersebut dengan menggunakan anggaran program yang berhasil tersalurkan seluruhnya. Program bantuan rumah layak huni dapat dilaksanakan dengan serapan anggaran untuk realisasi fisik dilapangan sesuai ketentuan. Informasi yang didapat dari pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kuantan Singingi selaku pengelola pelaksana program bantuan rumah layak huni sekaligus sebagai pengguna anggaran menyebutkan laporan audit internal penggunaan anggaran menunjukkan bahwa program berhasil dengan baik. Demikian pula oleh pihak legislatif (DPRD) selaku lembaga fungsi budgeting dan pengawasan, realisasi pelaksanaan program dapat diterima dan dinilai baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran program dapat tercapai 100% yang berarti seluruh dana yang di anggarkan dapat disalurkan untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan dalam implementasi program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Benai. Sehingga dari segi penggunaan anggaran tidak terjadi penyimpangan, hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi program bantuan rumah layak huni dapat berhasil dengan tepat guna.

Sebagaimana sasaran kebijakan program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Benai maksud dan tujuannya seperti yang telah disebutkan tertuang dalam peraturan bupati Kuantan Singingi. Oleh karena itu kinerja implementasi program yang baik tentu harus dapat mewujudkan atau mencapai maksud dan tujuan kebijakan yang dapat dirasakan atau dinikmati masyarakat, Khususnya bagi warga masyarakat penerima atau kelompok sasaran.

2. Kepatuhan Kelompok Sasaran

Berdasarkan pengamatan dilapangan maka persyaratan yang ditetapkan sebagai penerima program rumah layak huni oleh masyarakat tidak terlalu memberatkan, bahkan sebagian besar masyarakat menyebutnya sangat ringan. Dengan demikian secara umum masyarakat menilai persyaratan sebagai penerima program rumah layak huni relatif mudah dan tidak memberatkan. Dengan adanya program bantuan rumah layak huni, jadi masyarakat menilai mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

3. Dampak Nyata Kebijakan

Dengan implementasi program bantuan rumah layak huni yang pelaksanaannya memberikan peluang kemandirian dan pemberdayaan masyarakat juga telah memberi peluang pendapatan bagi masyarakat. Dengan diperlukan bahan bangunan untuk pelaksanaan rehabilitas rumah tidak layak huni maka memberi peluang warga masyarakat untuk menjadi pemasok bahan bangunan tersebut. Terlebih bagi yang telah memiliki keterampilan menghasilkan bahan bangunan, seperti pembuatan bata atau batako, pengerjaan kayu, dan juga keahlian mengerjakan sebagai tukang bangunan.

Disisi lain, sebagai keluarga yang memikirkan kebutuhan anggota keluarga akan hunian yang layak tentu berusaha untuk menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk ditabung dan dialokasikan untuk membangun rumah. Dengan adanya implementasi program bantuan rumah layak huni maka warga masyarakat dapat mengalihkan alokasi dana tabungan tersebut untuk kebutuhan yang lain, seperti biaya pendidikan atau sekolah anak-anaknya, atau untuk keperluan lain yang lebih meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Dengan demikian implementasi program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Benai telah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut gambar sebelum dan sesudah dilakukan program bantuan rumah layak huni.



Gambar 7. Rumah sebelum pelaksanaan program bantuan



Gambar 8. Rumah sesudah pelaksanaan program bantuan

4. Persepsi Terhadap Dampak

Kinerja Implementasi program yang baik tidak terlepas dari dukungan positif semua pihak yang ditunjukkan, baik oleh Aparat Pemerintah, personil sumberdaya manusia (SDM) petugas atau pelaksana program, maupun masyarakatnya. Kesungguhan Pemerintah dalam mengupayakan perbaikan kesejahteraan hidup masyarakat melalui program bantuan rumah layak huni, dan kesungguhan pelaksana program dalam melaksanakan program bantuan rumah layak huni dinilai masyarakat secara positif.

Persepsi masyarakat sangat positif terhadap sikap pemerintah, karena dinilai sangat sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan, memandang sangat penting terhadap program bantuan rumah layak huni. Dan pelaksanaan program yang sangat sungguh-sungguh dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni. Persepsi tersebut merupakan cerminan sikap masyarakat yang menghargai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi program dapat terlaksana dengan baik tidak lepas dengan dukungan positif berbagai faktor. Beberapa faktor tersebut yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam faktor komunikasi dan faktor sikap dan perilaku. Dukungan positif bisa berasal dari pihak pengelola atau pelaksana program maupun dari pihak masyarakat atau publik. Sikap masyarakat yang menerima program dan berpartisipasi aktif melaksanakan kegiatan dalam



implementasi program merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan. Sebagaimana pada rumusan analisis, sikap partisipasi warga masyarakat dalam implementasi program diketahui sangat tinggi. Beberapa hal yang berkaitan komunikasi program yang mempengaruhi sikap masyarakat, yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja implementasi program yang dirasakan.

Pengetahaun masyarakat terhadap adanya implementasi program bantuan rumah layak huni tidak terlepas kaitannya dengan adanya sosialisasi program yang dilaksanakan dengan baik oleh pengelola atau pelaksana program. Tingkat partisipasi masyarakat terlihat positif, masyarakat lebih banyak yang menyatakan sering atau sangat sering menghadiri kegiatan sosialisasi. Kehadiran masyarakat dalam sosialisasi program tidak lepas kaitannya dengan pentingnya sosialisasi program bagi masyarakat. Sosialisasi sebelum pelaksanaan program bantuan rumah layak huni dinilai baik oleh masyarakat dirasakan cukup diperlukan atau bahkan sangat perlu. Hal itu dirasakan masyarakat karena mereka membutuhkan informasi mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan implementasi program bantuan rumah layak huni yang harus mereka ikuti prosedurnya. Pelaksanaan program juga menyatakan bahwa sosialisasi program sangat diperlukan karena untuk memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada masyarakat dan semua pihak yang berkait dalam tim koordinasi program. Efektivitas cara-cara sosialisasi program dalam menanamkan pemahaman kepada masyarakat tentang program bantuan rumah layak huni, pelaksanaan program menyatakan cara-cara sosialisasi program dinilai sudah efektif.

Ada sedikit hambatan yang secara umum muncul dalam sosialisasi program bantuan rumah layak huni. Pelaksanaan program menyatakan cukup banyak menemui hambatan dalam sosialisasi program yang terutama adalah karena faktor keterbatasan masyarakat yaitu terbatasnya keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia, hambatan lain yang muncul dalam sosialisasi yaitu transportasi, rendahnya kemampuan pemahaman masyarakat, dan adanya alasan tidak hadir disosialisasi karena mencari nafkah. Transportasi yang dimaksud yaitu tidak adanya kendaraan masyarakat untuk menghadiri sosialisasi karena sosialisasi di adakan di kantor kecamatan atau di salah satu desa yang mnedapatkan bantuan program.

Adanya sikap positif atau kesungguhan dan partisipasi bersama-sama antara pemerintah, pelaksana program dan masyarakat dalam melaksanakan program bantuan rumah layak huni juga menunjukkan bahwa implementasi program tersebut telah memberikan dampak positif, yaitu menimbulkan kesamaan visi untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kajian Implementasi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Benai sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.
2. Terdapat hambatan dalam sosialisasi program bantuan rumah layak huni, diantaranya faktor keterbatasan masyarakat yaitu terbatasnya keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia atau rendahnya kemampuan masyarakat dalam memahami program tersebut.
3. Tingkat keberhasilan implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kecamatan Benai di ukur dari keluaran kebijakan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, kepatuhan kelompok sasaran sudah tepat dengan sasaran , dampak nyata



kebijakan sudah tercapainya tujuan yang diinginkan dan persepsi terhadap dampak yang mana sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menerima bantuan program. Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksana (Implementator) dalam mengatasi hambatan yang ada.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada tim pelaksana kegiatan dimulai dari tingkat pusat sampai masyarakat agar menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sehingga tahapan-tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar selalu ikut serta dan berpartisipasi dalam setiap tahapan sosialisasi program rumah layak huni, agar program bantuan tepat sasaran. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan maka dilakukan pemeliharaan sehingga hasil program bisa bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Wahab, Solichin.2001. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- [2] Anwas, Oos M. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global. Bandung: Alfabeta.
- [3] Arikunto, Suharsimi. 2002. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rieneke Cipta.
- [4] Hutahean, Marlan.1997. Implementasi Kebijakan IDT Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Studi Kasus Di Desa Wakirharjo Kecamatan Prambanan, Tesis magister). Program Studi Magister Administrasi Public Program Pasca Sarjana UGM: Yogyakarta.
- [5] Mardikonto, Totok.2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- [6] Mardimin. 1996. Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia. Yogyakarta. Kanisius.
- [7] Moleong, L.J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [8] Nofitri. 2009. Gambaran Kualitas Hidup Penduduk di Jakarta. Depok. Universitas Indonesia.